



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RENCANA KERJA



RENJA 2026

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Rlayat Syah Gedung Daeng Kamboja LT, 1
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang



Bakesbangpol Kepri



<https://kesbangpol.kepriprov.go.id>



[bakesbangpol.kepri](https://www.instagram.com/bakesbangpol.kepri)

 Lanjungpina
 KESATUAN
 PROVINSI
 Drs. MUHA
 Pembina Uta
 NIP.196905

Renja SKPD disusun sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD yang merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Secara substantif Rencana Kerja SKPD adalah dokumen Rancangan perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Melalui penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 , maka dokumen perencanaan pembangunan yang ada menjadi lebih rinci dan operasional, karena rencana kerja lebih menekankan pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat operasional. Dengan disusunnya Rancangan rencana kerja yang selanjutnya dijadikan dasar utama penyusunan Renja SKPD dan selanjutnya RKA, diharapkan terjadi keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Tahun 2026 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan arah pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan satu tahun ke depan.

Tanjungpinang, Oktober 2025
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
RO VINSI KEPULAUAN RIAU,

Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si.
Pembina Utama Madya(IV/d)
NIP. 19690510199401 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesbangpol	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol	16
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD	20
2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	32
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	82
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	82
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026	83
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	87
BAB V. PENUTUP	100

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 melalui tahapan – tahapan :

1) Persiapan penyusunan

- Pembentukan Tim Penyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau TA 2026
- Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja 2025, pengendalian kegiatan tahun 2024 , dan RKPD 2025)

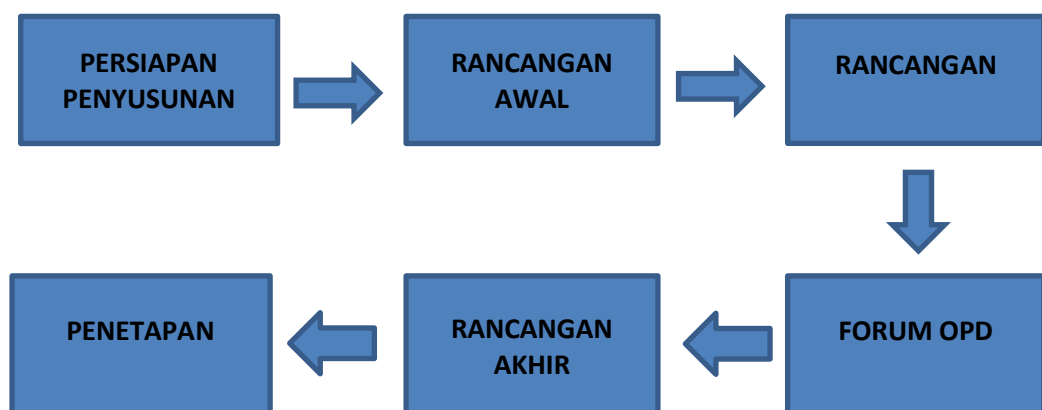
(2) Penyusunan Rancangan Awal Renja 2026

- Berpedoman pada Perubahan Renstra 2021-2026 Badan Kesbangpol Provinsi Kepri.
- Koordinasi antar Bidang dengan Pejabat Fungsional Perencana Badan Kesbangpol Provinsi Kepri.

- Desk dengan bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Penyusunan rancangan
 - Berpedoman pada surat edaran Kepala Daerah yang memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dan Rancangan Awal RKPD.
 - Sinkronisasi dan Dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
- (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengikuti Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD 2026.
 - Diverifikasi oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.
- (6) Penetapan.

GAMBAR 1.1

**Tahapan Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2026**



Rencana Kerja 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah penjabaran dari Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau 2025 – 2029 . Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 serta berdasarkan pada RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, serta memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 , dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program/kegiatan/sub kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Tahun 2026 .
2. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum (mengacu pada dasar hukum RPJMD 2025-2029)

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerjam Perangkat Daerah.
29. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1062);
30. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026⁵ sebagai berikut :

1. Maksud

Sebagai acuan dalam menentukan sasaran, arah kebijakan, sekaligus pedoman untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama satu tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 dengan dilengkapi indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja..

2. Tujuan

Rancangan Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan yang mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja Tahun 2026 ;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu , berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 .

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi tentang Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kesbangpol Tahun 2026 .

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan/Sub Kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Di dalam Dokumen Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2026 jumlah kegiatan yang di usulkan sebanyak 12 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 39 sub kegiatan. Dari 6 program 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan tersebut, semuanya merupakan nomenklatur baru yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun **2024** (Tahun n-2) menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan berjalan dengan sangat baik, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau mengelola pagu anggaran sebesar **Rp. 185.593.956.247,00** dengan realisasi anggaran sebesar **180.159.124.503 (97,07 %)** atau sebesar **97,07%**, dan realisasi fisik sebesar **100 %**.

A. Capaian Target Indikator Sasaran

Berikut ini akan diuraikan Realisasi Pencapaian Sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yang tertuanag dalam table sebagai berikut :

**Tabel 2.1
Pencapaian Target Indikator Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Meningkatnya Kinerja Organisasi	1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	70,76	75,30	106,42
2.	2. Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	1. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	81,62	82,21	100,72
		2. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku	1. Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	2,85	3,04	106,67

Berikut akan diuraikan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan hingga Triwulan IV Tahun 2024.

Menurut catatan yang tersedia dalam table 4.1 Pengukuran Pencapaian Target Tujuan 1, Meningkatnya Kinerja Organisasi, dengan indikator sasarannya yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan Target Kinerja Sasarannya 70,76 dengan capaian target 75,30 atau persentase capaian targetnya sebesar 106,42 %. Persentase capaian target kinerjanya pada Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 106,42 % dan berada pada interval nilai evaluasi $91 \% \leq 100\%$ dengan status“Sangat Tinggi”. Angka ini didapat dari Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor : LHE.34/EVALUASI

SAKIP/ITPPROV/2024 Tanggal 18 Nopember 2024 yang dirilis oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Adapun untuk analisa Tujuan 2, yaitu Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama terdiri dari Sasaran yaitu : 1. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama dan 2. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku.

Dalam sasaran 1 ini dapat dijelaskan bahwa dalam meningkatkan harmonisasi antar umat beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan target 81,62 dengan capaian angka indeks kerukunan umat beragama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dengan capaian 82,21 yang dirilis oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, dengan persentase capaiannya Sangat Tinggi (ST) yang berada pada interval nilai evaluasi $91 \leq 100 \%$, dengan capaian target kinerjanya 100,72 %.

Sementara untuk sasaran 2 berupa Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional, dengan target pada tahun 2024 dengan Indeks pada angka 2,85 dan Indeks Ketahanan Nasional Kepri ada pada angka 3,04 yang telah dirilis oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI), sehingga capaian indikatornya diatas target yang sudah ditetapkan yang berada pada interval nilai evaluasi $91 \leq 100 \%$, dengan capaiannya Sangat Tinggi (ST), dengan capaian target kinerjanya masih 106,67 %

B. Capaian Target Indikator Program

Tabel di bawah ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator program Renja 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi.

Tabel 2.2
Pencapaian Target Indikator Program Tahun 2024

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 (TW IV)	% Capaian Target 2024 (TW IV)
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan	Persentase Konflik Sosial tertangani	%	100	100	100 %

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 (TW IV)	% Capaian Target 2024 (TW IV)
	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					
2.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	%	88 %	99,01 %	112,51 %
3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Konflik antar Agama	%	0 %	0 %	100 %
4.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0 %	0 %	100 %
5.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	angka	70	78,07 (Pileg dan Pilpres) 54,60 (Pilkada) 66,34 (Angka rata-rata)	94,77 %
		2. Indeks Demokrasi Indonesia (Prov. Kepri)	%	78,78	77,66 (Data Indeks Demokrasi Indonesia Kepri 2023 yang dirilis oleh BPS Kepulauan Riau pada pertengahan tahun 2024)	98,58
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100

Sesuai dengan Tabel 4.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa sampai Triwulan IV Tahun 2024 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial capaian Targetnya di angka 100 %, capaian ini didapat karena tidak ada terjadi Konflik Sosial berskala besar di Provinsi Kepulauan Riau sampai Triwulan IV tahun 2024, sehingga capaian targetnya 100 %. Hal ini mencerminkan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial ini pada Triwulan IV Tahun 2024 ini berada pada interval nilai evaluasi $91 \% \leq 100 \%$ dengan status “Sangat Tinggi (ST)”.

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang capaian Targetnya pada Triwulan IV Tahun 2024 ini di angka 99,01 %, dimana Organisasi Masyarakat yang sesuai aturan perundangan-undangan yang terdata di Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau yang masa aktif Organisasinya masih berlaku pada tahun 2024 yang ditargetkan 88 %, dimana Ormas/LSM yang terdata ini sampai Triwulan IV Tahun 2024 adalah 203 Ormas, dengan 201 Ormas yang sesuai dengan aturan perundang-undangan pada tahun 2024. Persentase capaian target kinerjanya pada Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 112,51 % dan berada pada interval nilai evaluasi $91 \% \leq 100 \%$ dengan status “Sangat Tinggi”.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator Persentase Konflik antar Agama yang targetnya 0 (nol) %, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, tidak terdapat konflik antar agama berskala besar di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga capaiannya 100 % yang berada pada interval nilai evaluasi $91 \leq 100\%$ dengan capaian status “Sangat Tinggi”.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator Persentase Konflik antar suku dan etnis, dimana tidak adanya terjadi konflik antar suku dan etnis yang terjadi berskala besar sampai Triwulan IV tahun 2024, sehingga capaiannya 100 % yang berada pada level nilai evaluasi $68\% \leq 100\%$ dengan mendapat status “Sangat Tinggi”.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan 2 indikator ; 1. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) ; 2. Indeks Demokrasi Indonesia (Prov. Kepri). Untuk indikator diatas sampai Triwulan IV untuk tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan dan Pemilu Legislatif (Pileg) capaiannya 111,53 %, dimana untuk tingkat partisipasi politik masyarakat ditargetkan diangka 70, sementara capaian tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilu Pilpres dan Pileg 2024 mencapai angka 78,07. Capaian angka tingkat partisipasi ini melampau dari target

yang ada, sehingga capaian kinerja berada pada level nilai evaluasi $91\% \leq 100\%$ dengan mendapat status “Sangat Tinggi”. Sementara untuk status Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kepulauan Riau, tingkat partisipasi politik masyarakat ditarget di angka 70, dan capaiannya pada pilkada Kepulauan Riau 2024 hanya mencapai angka partisipasi 54,60 sehingga capaian kinerjanya 78 % yang berada pada nilai evaluasi $91\% \leq 100\%$ dengan status “Tinggi”.

Sementara untuk indikator Indeks Demokrasi Indonesia Kepulauan Riau didapatkan angka 77,66 (Data Indeks Demokrasi Indonesia Kepri 2023 yang dirilis oleh BPS Kepulauan Riau pada pertengahan tahun 2024), dimana target Indeks Demokrasi Indonesia Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah 78,78. Capaian persentase kinerja sebesar 98,58 yang berada pada level nilai evaluasi $91\% \leq 100\%$ dengan status “Sangat Tinggi”.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor, dengan target capaian indikatornya 100 %, dimana sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 ini capaian indikatornya sudah berada pada angka 100 % , sehingga apabila kita lihat pada tabel evaluasi Renja Triwulan IV berada pada level nilai evaluasi $91\% \leq 100\%$ dengan status “Sangat Tinggi”.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kesbangpol

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja. Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 (n-2) berdasarkan LKjIP 2024 yang sudah disusun menetapkan tiga sasaran strategis, tiga indikator kinerja. Pelaksanaan program/ kegiatan dalam pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut: (Tabel 2.3)

Berikut akan diuraikan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 (Lihat Tabel 3.2)

1. Tujuan 1 Meningkatnya Kinerja Organisasi dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun anggaran 2024 dengan target 70,76 dan capaian kinerjanya mendapat nilai 75,30 dengan capaian kinerja 106,42 % dengan Predikat “Sangat Baik” .
2. Tujuan 2 Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama memiliki 2 sasaran yaitu :
 1. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun anggaran 2024 ditetapkan target indeksnya sebesar 81,62 dengan realisasi 82,21 dan capaian kinerjanya 100,72 % dengan predikat “Sangat Baik”.
 2. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional Kepulauan Riau, dimana pada tahun 2024 ditetapkan indeksnya di angka 2,85 dan realisasi capaiannya indeksnya pada tahun 2024 adalah 3,04 (rilis Lemhanas RI) dengan kinerjanya sebesar 106,67 % dengan predikat “Sangat Baik”.

Tabel 2.2
Pencapaian Target Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Abjad	70,76	75,30	106,42
2.	Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	2. Meningkatkan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	81,62	82,21	100,72
		3. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	2,85	3,04	106,67

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol

A. Kinerja Pelayanan OPD

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tingkat kondusifitas Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pencapaian kinerja, pengukuran tingkat keberhasilan dapat diukur melalui program yang telah dilaksanakan dan direncanakan.

Kegiatan evaluasi perencanaan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai tolok ukur dalam melakukan perencanaan pada masa mendatang. Sebagai bagian perencanaan yang memiliki fungsi dasar dalam manajemen dengan tujuan untuk mendapat informasi sejauhmana efisiensi dan efektifitas kinerja pada Badan Kesbangpol.

Evaluasi terhadap perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum semua masalah yang timbul dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi perencanaan telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian efisiensi dan efektifitas.

B. Isu - isu Strategis Bakesbangpol

Isu strategis merupakan pernyataan mengenai permasalahan pokok yang memiliki dampak luas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta menuntut perhatian dan penanganan yang serius dalam periode perencanaan jangka menengah. Dalam konteks Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan, pencapaian indikator kinerja utama, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan dinamika aktual kewilayahan.

Sebagai daerah kepulauan dan perbatasan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki kompleksitas tersendiri dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik. Posisi strategis wilayah, keberagaman masyarakat, dinamika politik lokal, serta potensi gangguan terhadap stabilitas sosial menjadikan peran Badan Kesbangpol sangat penting dalam menjaga ketahanan ideologi, memperkuat demokrasi, serta membangun tata kelola kelembagaan yang akuntabel.

Rumusan isu strategis daerah berikut ini juga selaras dengan isu strategis nasional yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan

Menengah, khususnya dalam pilar pembangunan ideologi, demokrasi, hukum, dan kerukunan sosial. Adapun isu-isu strategis Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1) Penguatan peran kelembagaan politik dan demokrasi daerah dalam rangka peningkatan kualitas Indeks Demokrasi Provinsi;

Upaya mendorong peningkatan Indeks Demokrasi Provinsi Kepri memerlukan penguatan peran partai politik dan lembaga pemerintahan dalam memberikan pendidikan politik yang inklusif kepada masyarakat. Langkah strategis yang diperlukan mencakup fasilitasi pendidikan politik secara lebih luas kepada kelompok sasaran seperti pemilih pemula, organisasi perempuan, dan masyarakat umum, serta peningkatan kualitas kelembagaan partai politik dalam mendorong tata kelola demokrasi yang partisipatif. Isu ini selaras dengan Isu Strategis Nasional, yaitu penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan ketahanan ideologi dan kehidupan berbangsa, melalui penguatan kapasitas lembaga demokrasi dan peningkatan literasi politik masyarakat.

2) Penguatan ketahanan sosial dan ideologi kebangsaan melalui peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan potensi konflik sosial berbasis komunitas;

Dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah yang multikultural, diperlukan upaya pembinaan wawasan kebangsaan yang lebih terstruktur, menyasar kelompok pemuda, ormas, serta masyarakat akar rumput. Selain itu, mekanisme deteksi dini, forum dialog komunitas, dan sistem peringatan dini perlu diperkuat guna mencegah konflik berbasis identitas dan sosial-budaya. Isu ini mendukung Isu Strategis Nasional yaitu; “penguatan harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama melalui penyelarasan kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran”.

C. Tantangan dan Peluang

1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

1.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan layanannya terdiri dari tantangan yang bersifat internal dan tantangan yang bersifat eksternal sebagai berikut:

A. Tantangan Internal

Tantangan internal yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan layanan adalah:

- 1) Jumlah sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan kompeten di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 2) Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik masih sangat minim.
- 3) Sarana dan prasarana aparatur pemerintah pada Badan Kesbangpol belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
- 4) Masih minimnya kompetensi sumberdaya aparatur bidang intelejen.

B. Tantangan Eksternal

Tantangan Eksternal yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan layanan adalah:

1) Tantangan Ideologi

Kurangnya penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila mengakibatkan terjadi krisis moral Bangsa yang berkepanjangan sehingga terjadi pola pikir, pola sikap dan pola tindak warga negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila sebagai dasar Negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa serta pemersatu bangsa. Kondisi yang demikian akan terjadi kerawanan sosial yang mengarah kepada disintegrasi bangsa.

2) Tantangan Politik

Perseteruan antar elite politik yang berkepanjangan, mengakibatkan terjadinya krisis kebijakan politik dalam kebijakan nasional karena tidak adanya etika, budaya dan komunikasi politik serta kompromi politik dalam menentukan kebijakan politik nasional, sehingga berpengaruh terhadap kebijakan di bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kondisi yang demikian akan dapat menyebabkan terjadinya kerawanan sosial dengan mengedepankan kepentingan politik pribadi dan atau golongannya bukan untuk kepentingan Bangsa dan Negara. Apabila kondisi tersebut terus berkepanjangan maka akan dapat mengarah kepada perpecahan dalam

persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menjurus terjadinya disintegrasi bangsa.

3) Tantangan Ekonomi

Terpuruknya perekonomian di Indonesia akibat krisis kebijakan politik yang tidak jelas dan perseteruan elit politik yang berkepanjangan. Hal ini mengakibatkan krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kondisi yang demikian akan terjadi kerawanan sosial karena banyaknya pengangguran, lapangan kerja sangat terbatas khususnya kegiatan padat karya yang belum memungkinkan karena tidak adanya dana, sehingga mendorong terjadinya kerawanan gangguan keamanan yang semakin tinggi.

4) Tantangan Sosial Budaya

Konflik antar suku bangsa dan suku etnis yang memiliki ciri budaya masing-masing, dan selanjutnya berkembang menjadi permusuhan antara agama yang terjadi di daerah rawan konflik dewasa ini mengakibatkan timbulnya krisis sosial budaya. Kondisi yang demikian akan mendorong kerawanan sosial dan selanjutnya terus terjadi gejolak sosial yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mengarah kepada disintegrasi bangsa.

5) Tantangan Krisis Moral Bangsa

Apabila disimak secara cermat bahwa kondisi aktual saat ini adalah akibat perseteruan antar elit politik, sehingga terjadi krisis multidimensi yang sudah diambang membahayakan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi tersebut karena masyarakat sudah mulai luntur semangat rasa kebangsaan, yang ditandai dengan mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya diatas kepentingan bangsa dan negara, sehingga membawa dampak yang negatif penyimpangan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Kondisi yang demikian perlu diwaspadai karena merupakan permasalahan yang mendasar pada kondisi aktual saat ini, sehingga perlu segera dikembangkan tingkatan kualitas warga negaranya untuk kembali kepada jati diri bangsa yang memiliki semangat rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air melalui pemantapan kesatuan bangsa. Dengan

demikian didalam pengkajian masalah strategis Pemantapan Kesatuan, agar tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan RI, tidak terlepas dari Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia yang memiliki nilai kejuangan, nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan yaitu wawasan nusantara dan ketahanan nasional sebagai pisau analisa didalam memecahkan/mengkaji permasalahan kondisi aktual yang timbul saat ini meliputi aspek idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).

- 6) Tantangan Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Lingkungan Hidup
Isu demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup akibat globalisasi telah merambah dalam berbagai forum Internasional yang banyak dipengaruhi oleh pandangan Barat untuk memaksakan kehendaknya, sedangkan hak asasi manusia adalah hak individu secara mutlak dan universal. Hal tersebut terlihat dari:
 - a) Munculnya berbagai macam Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - b) Tuntutan perkembangan kualitas produksi yang berwawasan global.
 - c) Tekanan dan tuntutan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang.
- 7) Tantangan Budaya Primordialisme dan Paternalistik
Budaya ini di kalangan masyarakat terasa menguat karena munculnya kembali politik aliran. Pengelompokan masyarakat seperti ini turut mendorong penguatan politik aliran yang menempatkan kepentingan kelompok diatas kepentingan bersama. Kondisi ini dirasakan menghambat demokratisasi karena masyarakat hidup berkelompok-kelompok menurut golongannya (agama dan etnis) dan akan mempengaruhi pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 8) Tantangan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi Informasi komunikasi dan transportasi, menyebabkan isu-isu global tersebut menjadi semakin cepat menyebar dan menerpa pada berbagai tatanan, baik tatanan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, globalisasi yang ditunjang dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah

menjadikan dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas-batas negara.

Kondisi objektif wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari kepulauan dan lautan yang luas berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. Wilayah perairan merupakan jalur internasional, sedangkan kondisi warga masyarakat sangat majemuk dapat menjadi potensi konflik jika tidak ditangani secara bijaksana. Disamping itu letak wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura dapat pula menimbulkan persengketaan titik batas antara Provinsi Kepulauan Riau dengan negara tetangga yang dimaksud, yang pada gilirannya menjadi persengketaan antara negara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga.

Kemajemukan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang rawan Konflik merupakan akibat dari implementasi Otonomi Daerah yang belum tuntas, kebijakan Publik yang belum memuaskan, kesenjangan ekonomi yang masih kentara, rendahnya kesadaran hukum, telah memicu timbulnya tirani massa yang mengarah pada potensi tindak kekerasan. Disamping itu masih merosotnya etika dan moral masyarakat yang merupakan dampak dari harus globalisasi baik melalui media cetak audio visual maupun internet. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat masih rendah sehingga cenderung melihat permasalahan dari sisi emosional dari pada secara rasional.

Badan Kesbangpol memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, yang saat ini dihadapkan kepada tugas-tugas komplek. selain kondisi umum wilayah Provinsi Kepulauan Riau, masalah lain yang dihadapi adanya faktor-faktor kurang kondusif yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol. Namun demikian Badan Kesbangpol juga memiliki momentum strategis yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan yang signifikan dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai. Guna mendukung analisis selanjutnya maka berikut ini akan diidentifikasi analisis lingkungan baik Internal maupun Eksternal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.2 Peluang

Disamping adanya tantangan, di sisi lain juga terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan layanannya. Peluang tersebut di antaranya adalah:

1) Adanya dukungan pemerintah pusat dan Instansi terkait dalam

pelaksanaan tugas fungsi Badan Kesbangpol.

- 2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
- 3) Adanya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kerukunan hidup beragama.
- 4) Kemajuan teknologi informasi yang dapat memudahkan penyebaran informasi bidang kesatuan bangsa dan politik kepada masyarakat.
- 5) Badan Kesbangpol sebagai satu-satunya perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- 6) Badan Kesbangpol merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai “mata dan telinganya” kepala daerah.

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

- a. Kondisi Geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga berpotensi menggerus Idiologi dan Rasa Kebangsaan Masyarakat Provinsi Kepri Terutama pada Pulau Pulau Terluar.
- b. Masih Adanya Sekelompok masyarakat yang memiliki pemahaman radikal ekstrim, pemahaman agama yang terlalu ekstrim yang perlu di berikan Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
- c. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-Bhineka-an, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Kepulauan Riau dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;
- d. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- e. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu dan Pemilukada masih dibawah 90%, dan tingkat keterwakilan perempuan di DPRD masih rendah yang belum mencapai target undang-undang (30%) yang mempengaruhi menurunnya Indeks Demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Belum adanya data base ormas di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.
- g. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang

berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.

- h. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
- i. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan secara salah.
- j. Masih rendahnya daya beli masyarakat pasca covid-19 yang menyebabkan menurunnya indeks ketahanan ekonomi masyarakat.
- k. Belum disahkannya perda Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) , belum memiliki Tim Terpadu P4GN , dan belum Memiliki Rencana Aksi Daerah tentang P4GN.
- l. Potensi konflik yang besar, di karenakan letak dan posisi berada di daerah perbatas sehingga rawan terhadap i konflik (Konflik Batas wilayah, konflik perdagangan), terdapatnya pelabuhan yang tidak resmi sehingga berpotensi adanya penyelundupan yang cukup besar (penyelundupan orang, barang dan lain sebagainya), dan potensi konflik yang dipicu oleh suku, antar golongan, ras, dan agama di Provinsi Kepulauan Riau cukup besar dikarenakan penduduk Provinsi Kepri Heterogen.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Kepulauan Riau dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
- e. Stabilitasnya sistem politik Kepulauan Riau sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

D. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Kepulauan Riau tersebut

diperlukan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat.
4. Meningkatkan Kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk menyusun Rencana Aksi guna peningkatan skor IDI;
5. Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;
6. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.
7. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
8. Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangka antisipasi isu negatif yang berkembang;
9. Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;
10. Koordinasi dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi antar agama dan antar etnis yang ada.
11. Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) di daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 terhadap Program, Kegiatan dan sub kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 perlu ditinjau kembali dan diperbaiki sebelum ditetapkan RKPD Tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.5.** berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Renja Tahun 2026
Provinsi Kepulauan Riau

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

N o.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		26.957.189.382	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		15.476.444.245	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		575.000.000	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Doku men	100.000.000	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Doku men	59.484.254	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapor an	100.000.000	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapor an	27.396.027	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>		Jumlah Dokumen penyusunan DPA SKPD	2 Doku men	50.000.000	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>		Jumlah Dokumen penyusunan DPA SKPD	2 Doku men	26.018.260	

**Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026**

N o.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	7.170.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	9.418.852.654	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/Bl n	6.500.000.000	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/Bl n	8.865.150.603	
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Doku men	670.000.000	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokum en	522.780.000	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Doku men	22.083.875	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokum en	22.083.875	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>		Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Doku men	25.159.778	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>		Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokum en	25.159.778	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	170.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	9.141.400	
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	30.000.000	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	70.000.000	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket		;
	<i>Pendataan dan Pengolaan Administrasi Kepegawaian</i>		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Doku men		<i>Pendataan dan Pengolaan Administrasi Kepegawaian</i>		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokum en		
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Doku men	20.000.000	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokum en		;
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	50.000.000	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	9.141.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	16.727.189.382	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	674.808.134	

**Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026**

N o.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.000.000	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.424.633	
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	63.000.000	
	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	106.625.000	
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	16.317.189.382	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	433.573.875	
	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	70.000.000	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	2.000.000	
	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	100.000.000	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	48.184.626	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya barang milik daerah yang dapat mendukung kinerja OPD		600.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya barang milik daerah yang dapat mendukung kinerja OPD		2.465.114.638	
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	300.000.000			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-	
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit		<i>Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan</i>		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	-	
	<i>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	300.000.000	<i>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	2.465.114.638	

**Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026**

N o.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100%	1.840.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100%	520.117.429	
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.000.000	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	389.102.500	
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	170.000.000	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	26.000.000	
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.500.000.000	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	105.014.929	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Barang Kantor	100%	250.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Barang Kantor	100%	125.575.539	
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	250.000.000	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	120.575.539	
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	5.000.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Konflik antar suku dan etnis		368.844.159	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Konflik antar suku dan etnis		1.670.646.213	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100	368.844.159	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100	1.670.646.213	
			Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)	0.002				Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)	0.002	1.670.646.213	

**Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026**

N o.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 doku men	55.326.623	<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokum en	-	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 doku men	73.768.832	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokum en	-	
	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 orang	92.211.040	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 orang	-	
	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	6.066 Orang	92.211.040	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	6.066	265.000.000	
	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 lapora n	55.326.624	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 laporan	29.397.443	

**Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026**

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>					<i>Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>					
	<i>Pelaksanaan tugas paskibraka</i>		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 dokumen	76.623.354	<i>Pelaksanaan tugas paskibraka</i>		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 dokumen	76.623.354	
	<i>Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	40.425.293	<i>Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	40.425.293	
	<i>Pembentukan Paskibraka</i>		Jumlah Paskibraka	35 orang	1.259.200.123	<i>Pembentukan Paskibraka</i>		Jumlah Paskibraka	35 orang	1.259.200.123	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)	38,89	478.764.604	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)	38,89	5.223.843.700	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)		5.223.843.700	

**Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026**

N o.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		Jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja Bidang Politik dan Kelembagaan Politik	1 doku men	71.814.690	<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		Jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja Bidang Politik dan Kelembagaan Politik	1 dokum en	-	
	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Politik dan Kelembagaan Politik	1 doku men	95.752.921	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Politik dan Kelembagaan Politik	1 dokum en	-	
	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	6.114	119.691.151	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	6.114	36.576.000	
	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	119.691.151	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	5.156.815.700	

**Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026**

N o.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Lapor an	71.814.691	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Lapora n	30.452.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (%)	85		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (%)	85	3.277.743.683	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ormas	1 doku men		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ormas	1 doku men	3.277.743.683	
	<i>Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>		Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 doku men	136.104.572	<i>Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>		Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 doku men	-	
	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>		Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 doku men	181.472.763	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>		Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 doku men	-	

**Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026**

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang	226.840.953	<i>Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	200.000.000	
	<i>Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	226.840.953	<i>Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	3.038.559.483	
	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan	136.104.572	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan	39.184.200	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100	366.401.482	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100	1.628.315.267	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	1.628.315.267	

**Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026**

N o.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Doku men	54.960.222	<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokum en	-	
	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	73.280.296	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	-	
	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	91.600.371	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	23.750.979	
	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 Orang	91.600.371	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Orang	1.587.373.421	

**Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026**

N o.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Lapor an	54.960.222	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Lapora n	39.184.200	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani (%)	100	820.739.321	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani (%)	100	9.671.007.801	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 doku men		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 doku men	9.671.007.801	
	<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>	1 doku men	98.488.718	<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>	1 doku men	-	
	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>	1 doku men	106.696.112	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>	1 doku men	-	

**Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026**

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	164.147.864	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Orang	100.680.000	
	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang	139.525.685	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.190 Orang	3.527.803.990	
	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	147.733.078	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	20.398.302	
	<i>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</i>		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4 dokumen	164.147.864	<i>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</i>		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4 dokumen	6.022.125.509	

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Melalui Rapat Koordinasi Kesbangpol se Provinsi Kepulauan Riau belum diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan Provinsi. Melalui forum Musrenbang akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat, namun usulan yang masuk jika terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah, diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada. (Tabel 2.6)

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Kepulauan Riau

A. Program/Kegiatan Strategis Gubernur/Wakil Gubernur

No	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
1					
2					

B. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
1	Paguyuban Perkumpulan Keluarga Witihama Kota Batam	Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial, disharmoni antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya)	Paguyuban Perkumpulan Keluarga Witihama Kota Batam (Perum Lotus Garden Blok B No 16 RT 001 RW 013, Kelurahan Teluk tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam), Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
2	Perkumpulan Keluarga Besar Nagekeo Batam	Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial, disharmoni antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya)	Perkumpulan Keluarga Besar Nagekeo Batam (Citra Pandawa Asri Blok H7 No 15 RT 07 RW 03, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam), Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
3	Perkumpulan Kerukunan Ibu Ibu Rantau Kota Tanjungpinang	Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial, disharmoni antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan)	Jalan Brigjen Katamso Gg Kenanga III No 52 RT 004 RW 002 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
4	Lembaga Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau	Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial, disharmoni antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan)	Gedung Kauman Muhammadiyah Jl RH Fisabilillah Km 8 Atas Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
5	Yayasan Bustanul Ulum Bintan	Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana spiritual terhadap organisasi, lembaga, dan yayasan di Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
6	Komunitas Merah Putih Kepulauan Riau	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Karakter	Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
		Bangsa dan Aktualisasi dalam Kehidupan Masyarakat dari Ancaman Idiologi Asing dan Paham Radikal			Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
7	LINGKARAN KAJIAN POLITIK DAN OTONOMI DAERAH (LINGKAPOLDA)	Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial, disharmoni antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan)	Perumahan Bukit Raya Gang Rinjani 1 No.02 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
8	Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Batam	Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana spiritual terhadap organisasi, lembaga, dan yayasan di Provinsi Kepulauan Riau	Jl. Perumahan Duta Mas RT 002 RW 002, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
9	DEWAN PIMPINAN WILAYAH FORUM KOMUNIKASI BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA NUSANTARA (DPW FK-BPPPN) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial, disharmoni antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan)	Jl. Brigjen Katamso No. 01 Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
10	DPD LAMI PROVINSI KEPRI	Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial,	Dabo, Lingga, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik,	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
		disharmoni antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan)			Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
11	DPD BKPRMI Kab. Bintan	Peningkatan kualitas kehidupan politik dan demokrasi melalui peningkatan pemahaman politik dan nilai-nilai demokrasi serta Perbaikan Tata Kelola Partai Politik di Daerah.	Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					an di Daerah	
12	Ikatan Mahasiswa Muhammad iyah Kota Tanjungpinang	Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial, disharmoni antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan)	Jl RH Fisabilillah Kelurahan Batu XI, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
13	Ikatan Tionghoa Muda Dewan Pengurus Provinsi Kepulauan Riau	Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial, disharmoni antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan)	Jl Tambak No 138 Kelurahan Kemboja, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					Daerah	
14	PESPARAWI KABUPATEN KARIMUN	Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana spiritual terhadap organisasi, lembaga, dan yayasan di Provinsi Kepulauan Riau	LEMBAGA LPPD, KAB.KARIMUN TANJUNG BALAI KARIMUN, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
15	PERKUMPULAN KEKERABATAN MASYARAKAT BAWEAN KOTA BATAM	Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial, disharmoni antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan)	Kampung Bawean kel bengkong indah, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
16	Lembaga Pengembangan	Masih perlunya peningkatan sarana dan	Jl. Pos Komp. Bintang Indah Mall, Blok C, No.	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
	Tripitaka Gatha Provinsi Kepulauan Riau	prasarana spiritual terhadap organisasi, lembaga, dan yayasan di Provinsi Kepulauan Riau	12A-14, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau		Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
17	Sat Pol Airud di Wilayah Kabupaten Karimun	Peningkatan Koordinasi Forkopimda dan Instansi Pemerintah terkait dalam Mendukung Pencapaian Target Pembangunan	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Karimun, Jalan Ahmad Yani 01 Karimun 29661, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
18	Perkumpulan Urang Banten (PUB) Kota Batam (FPTI KEPRI)	Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial, disharmoni antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan)	Jl. Teratai I Blok A Nomor 6, Baloi Center, Lubuk Baja, Batam HP : 0821 7229 6750; TOWN HOUSE BUANA CENTRAL PARK BLOK MARSHAL NO 53 RT 005 RW 002 KELURAHAN KIBING KECAMATAN BATU AJI , Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
19	Senkom Mitra Polri Kepulauan Riau	Memperkokoh Idiologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan , Karakter Bangsa dan Aktualisasi dalam Kehidupan Masyarakat dari Ancaman Idiologi Asing dan Paham Radikal	Komplek Sakura Permai Lt. 3 Blok B No. 1-2 Kel. Kp. Seraya Kec. Batu Ampar Batam, Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
20	YAYASAN CAHAYA BINA KASIH	Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial, disharmoni	Jl. Sei Jang, RT 2/4, Kel. Sei Jang. Kec. Bukit Bestari , Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberda	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
		antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan)			yaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
21	DEWAN PERWAKILAN DAERAH WAWASAN HUKUM NUSANTARA BATAM (DPD.) WHN KOTA BAT	Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial, disharmoni antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan)	Kavling Sei Lekop, Blok E3A Nomor. 11 RT 02 RW 13, Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Sagulung Kota Batam, Email; whnkotabatam@gmail.com HP. 081276097165 , Provinsi Kepulauan Riau	170.058.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
22	Polsek Belakang Padang	Peningkatan Koordinasi Forkopimda dan Instansi Pemerintah terkait dalam Mendukung Pencapaian Target	Polsek Belakang Padang Jl. Hang Tuah No. 4 Kecamatan Belakang Padang (Kapolsek Belakang Padang Sonny	170.058.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
		Pembangunan	Fajri Hp. 081372409500), Provinsi Kepulauan Riau			
23	Perhimpunan Rakyat Progresif Provinsi Kepulauan Riau	Bantuan Biaya Perhimpunan Rakyat Progresif Provinsi Kepulauan Riau	Batam, Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
24	Yayasan Rasa Manunggal Duriangkang	Kurangnya Mobil Ambulan Kesehatan Untuk Yayasan Rasa Manunggal Duriangkang	Permata Asri II RT06 RW02 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
25	Perkumpulan Wanita Terampil Berkualitas	Kurangnya Motor Oparasional untuk Perkumpulan	Ruko Bukit Kemuning Blok CC2 No 2 Kelurahan Mangsang	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
		Wanita Terampil Berkualitas	Kecamatan Sungai Beduk, Provinsi Kepulauan Riau		n Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
26	Yayasan Krida Abdi Bangsa	Kurangnya Mobil Operasional Untuk Yayasan Krida Abdi Bangsa	Kavling Pancur Blok H No 15 RT03 RW03 Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk, Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
27	Banser Sei Beduk	Kurangnya sarana alat Drum Band untuk Banser Sei Beduk	Mangsang Indah Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk, Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
28	Yayasan Permata Perisai Bangsa Batam	Kurangnya sarana dan prasarana Yayasan Permata Perisai Bangsa Batam	Permata Asri II RT07 RW02 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
29	Paguyuban Manunggaling Roso Batam	Kurangnya Bantuan Kegiatan Paguyuban Manunggaling Roso Batam	Perumahan GMP Blok H RT06 RW01 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
30	Kerukunan Keluarga Perantau Purbalingga	Kurangnya Mobil Ambulan untuk Kerukunan	Mangsang Kebun RW03 Kelurahan Mangsang	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
		Keluarga Perantau Purbalingga	Kecamatan Sungai Beduk, Provinsi Kepulauan Riau		Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
31	Yayasan Muda Tionghoa Indonesia (YMTI) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau	Perlu Adanya Bantuan Hibah Keuangan Kepada Yayasan Muda Tionghoa Indonesia (YMTI) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau	Jl Tambak RT 003 RW 003 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat, Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
32	Lembaga Pemuda Katolik komisariat cabang Kota Tanjungpinang	Perlunya Bantuan Hibah Keuangan Kepada Lembaga Pemuda Katolik komisariat cabang Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
33	Yayasan Lestari Budaya bangsa	Permohonan Bantuan Dana Pembinaan Yayasan Lestari Budaya bangsa, Perum. Taman Jaya Asri, Blok. C1, No. 03-04, Batuaji-Batam	Perum. Taman Jaya Asri, Blok. C1, No. 03-04, Batuaji-Batam, Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
34	Pemuda Pancasila Kota Tanjungpinang	Masih kurangnya sosialisasi penumbuhan rasa cinta tanah air	Jln. Medang Nomor 1Ab/33 KcL. Sel Jang, Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					Asing di Daerah	
35	Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau	Kurangnya pemberdayaan yayasan	Kecamatan Tanjungpinang barat, Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
36	Persadan Sembiring Mergana, RAS Anak Beruna	Permohonan Bantuan Dana untuk Kelengkapan dan Fasilitas Gedung Pertemuan (Jambur), Persadan Sembiring Mergana, RAS Anak Beruna	Persadan Sembiring Mergana, RAS Anak Beruna, Jl. Sejahtera, Gg. Kencur No. 126 Kp. Harapan bersama, Desa Teluk Sasah , Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
37	Yayasan Sosial Pelantar Tiga	Masih kurangnya kegiatan	Jl, pelantar 3, No. 44, RT 2/3, kel. Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang Kota , Provinsi Kepulauan Riau	1.931.884	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspa daan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemanta uan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspa daan Perbatas an Antar Negara, Fasilitasi Kelembag aan Bidang Kewaspa daan, serta Penanga nan Konflik di Daerah	
38	Yayasan Senam Pagi Aixin	Masih kurangnya kegiatan masyarakat	Jl. bakar batu, No. 59, RT 1/12, Provinsi Kepulauan Riau	1.931.884	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspa daan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemanta uan Orang Asing, Tenaga	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
39	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Masih Ada ya disharmony sosial	Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	1.931.884	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					serta Penanganan Konflik di Daerah	
40	Yayasan Senam Sehat New Aisin	Masih kurangnya kegiatan sosial	Jl. Lorong Banjar, RT 4/4, Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat, Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
41	IKATAN KELUARGA BANYUWANGI BATAM	HIBAH UNTUK PERKUMPULAN IKATAN KELUARGA BANYUWANGI BATAM PERUMAHAN TIBAN POINT BLOK A4 NO 32 B RT 03 RW 013 KELURAHAN TIBAN INDAH KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM	PERUMAHAN TIBAN POINT BLOK A4 NO 32 B RT 03 RW 013 KELURAHAN TIBAN INDAH KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM , Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
42	Organisasi Perempuan Demokratis Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Demokratis Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

Total

27.433.997.263,55

C. Usulan Kabupaten/Kota

-

D. Usulan Masyarakat

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
1	Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026 Dukungan Kegiatan dan Kesekretariatan	Tanjungpinang	300.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
2	ICMI ORWIL Kepulauan Riau	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Tanjungpinang	200.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
3	Dewan Pengurus Wilayah - Panguyuban Keluarga Besar Pujakesuma	Permohonan Bantuan	Kepulauan Riau	150.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
4	DPD Barisan Pemuda Nusantara Kepulauan Riau (BAPERA)	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Tanjungpinang	150.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
5	Masyarakat ekonomi Syariah Provinsi Kepulauan Riau	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Tanjungpinang	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
6	DPD- GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA PROVINSI KEPRI	Permohonan Bantuan Dana	Kepulauan Riau	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
7	Markas Daerah Pemuda Panca Marga provinsi Kepulauan Riau	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Riau	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
8	Lembaga Permayarakatan	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Kepulauan Riau	500.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
9	PPAL Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Provinsi Kepri	Permohonan Hibah Kegiatan TA.2026	Tanjungpinang	75.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
10	PPAU Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara Provinsi Kepri	Permohonan Hibah Kegiatan TA.2026	Tanjungpinang	75.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
11	PPAD Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Provinsi Kepri	Permohonan Hibah Kegiatan TA.2026	Tanjungpinang	75.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
12	Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Daerah Kepulauan Riau	Permohonan Hibah Kegiatan TA.2026	Tanjungpinang	75.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
13	PERKUMPULAN KEKERABATAN MASYARAKAT BAWEAN (PKMB) PROVINSI KEPUALAUAN RIAU	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
14	HMI – Himpunan Mahasiswa Islam	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
15	GMNI – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
16	PMKRI – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
17	GMKI – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
18	PMII – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
19	IMM – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					Ormas Asing di Daerah	
20	KAMMI – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
21	SEMMI – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
22	HIMA PERSIS – Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					di Daerah	
23	KAHMI Prov KEPRI - Kesatuan Aksi Himpunan Mahasiswa Islam	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
24	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMRAH	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	41.666.667	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
25	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim (FEBM) UMRAH	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	41.666.667	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					di Daerah	
26	Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP) UMRAH	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	41.666.667	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
27	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) UMRAH	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	41.666.667	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
28	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman (FTTK) UMRAH	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	41.666.667	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					di Daerah	
29	Fakultas Kedokteran UMRAH	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	41.666.667	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
30	Bem UMRAH	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	41.666.667	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
31	Bem stisipol	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	41.666.667	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					di Daerah	
32	Bem stai miftahul ulum	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	41.666.667	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
33	Bem stain sar.	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	41.666.667	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
34	Bem STIE Pembangunan	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	41.666.667	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					di Daerah	
35	BEM STIKES Hangtuah	Permohonan Hibah Uang TA 2026	Kepulauan Riau	41.666.667	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
36	Brinus Kota Batam	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Batam	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
37	PW Asgar Batam	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Batam	400.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					di Daerah	
38	Fosiwaja Kepri	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Kepulauan Riau	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
39	IKBSS (Ikatan Keluarga Besar Sumatera Selatan)	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Kepulauan Riau	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
40	Paguyuban Keluarga Jambi	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Kepulauan Riau	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					di Daerah	
41	Paguyuban Warga Bengkulu	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Kepulauan Riau	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
42	Perkumpulan Banso BatakMARSADA (BBM)	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Kepulauan Riau	200.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
43	Badan Pengurus Daerah Kerukuna Keluarga Sulawesi Selatan Kota Batam	Permohonan Bantuan Akomodasi dan transportasi kegiatan mubes XII KKSS 2025	Batam	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
44	Dewan Pengurus Ikatan Tionghoa Muda Provinsi Kepulauan Riau	Permohonan Bantuan	Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
45	Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Kepulauan Riau	Permohonan bantuan pembiayaan rakerwil V-2024	Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
46	Dewan Pimpinan Daerah - Generasi Anti Narkotika Nasional	Bantuan Kegiatan Organisasi	Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
	(GANN)				an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
47	Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Prov. Kepri Kota Batam	Permohonan Bantuan Dana Hibah	Batam	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
48	DPC- Srikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga	Permohonan Bantuan Dana Hibah	Lingga	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
49	DPP- Rangkup Dayak Bersaudara Kota Batam Prov. Kepri	Permohonan Bantuan Dana	Batam	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
50	Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Batam	Permohonan Bantuan Dana	Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
51	Panitia Ikatan Keluarga Provinsi Kepulauan Riau (IKPKR) Bandung	Proposal Kegiatan Rapat Anggota IKPKR 2024 dan bazar Kuliner Melayu Kepri	Bandung	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
52	Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau	Pelaksanaan Pelantikan dan Rapat Kerja, serta pelatihan pemuda negarawan pengurus pimpinan wilayah pemuda muhammadiyah provinsi kepulauan riau	Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
53	Yayasan Lautan Biru Selingsing	Permohonan Bantuan Dana Operasional Yayasan	Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
54	Yayasan Lembaga Hati Gurindam Provinsi	Permohonan Bantuan Sekretariat	Kepulauan Riau	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
	Kepulauan Riau				Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
55	Yayasan Taruna Bangsa Kota Tanjungpinang	Permohonan Hibah Bantuan Dana Pengadaan Mobil Layanan/ Operasional Yayasan dan Kesekretariatan	Tanjungpinang	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
56	Yayasan Zondi Tina Mapan Tanjungpinang	Permohonan Bantuan Dana Kegiatan	Tanjungpinang	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					di Daerah	
57	Pemuda ICMI Provinsi Kepulauan Riau	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Tanjungpinang	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
58	Ikatan Pemuda Karya	Permohonan Bantuan Hibah TA 2026	Town House Buana Centra Park Clifton No. 24 Kel. Kibling, Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov Kepri	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
59	Dewan Pimpinan Wilayah Pro Garda Indonesia Bersatu (PROGIB) Provinsi	Permohonan Bantuan Dana Hibah	Ruko Imperium Superblock Blok B No. 6B Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota,	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
	Kepulauan Riau Negara Republik Indonesia		Batam - Kepulauan Riau		Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
60	Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Provinsi Kepulauan Riau	Permohonan Bantuan Dana Hibah	Jl. Adi Sucipto Km. 10 No. 16 Tanjungpinang Telp / Hp. 08127070695, 081270158074 , Tanjungpinang Timur	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
61	Pimpinan Wilayah Dewan Koordinasi Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Corp Brigade Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	Permohonan Bantuan Dana Hibah	Jl. Abulyatama No. Belian Batam Kepulauan Riau 29562	1.723.032	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

E. Usulan Instansi Vertikal

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
1	Badan Pengawas Pemilu	Permohonan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang	5.000.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
110	Komisi Pemilihan Umum	Permohonan Kelanjutana Pembangunan Gedung Kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau, dan Permohonan Pengadaan Kendaraan Dinas	Tanjungpinang	5.000.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
111	Badan Narkotika Nasional	Permohonan Hibah Dukungan	Batam	2.000.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
	Provinsi Kepulauan Riau	Operasional			Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
112	Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau	Permintaan bantuan hibah sarana dan prasarana pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Pembangunan Gedung Asrama Pegawai ASN Kajati 4 Lantai & Ruang Command Center	Tanjungpinang	1.400.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	
113	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau	Permohonan Bantuan Pematangan Lahan dan Pemasangan Batu Miring Pembangunan Poliklinik Polda Riau	Batam	1.400.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	
114	Komando Resor Militer	Dukungan Rencana Pembentuka	Tanjungpinang	1.400.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
	033/WP	n satuan baru dan verifikasi, sosialisasi/pe ngamanan/ dan lain lain Include TMMD			Provinsi	
115	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV	Kegiatan Penguatan Pembinaan Potensi Maritim, Peningkatan kemampuan intelijen dan deteksi dini di wilayah perbatasan dalam rangka program peningkatan kewaspadaa n nasional, dan dukungan lainnya	Batam	1.300.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
116	Badan Intelijen Negara	Permohonan Bantuan Hibah 1 Set LED Video Wall , 1 (satu) paket CCTV Kantor dan 20 set Lampu Solar Cell beserta Tiang dengan Pemasangan nya ke Badan	Batam	723.173.438	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
		Intelijen Negara Dan Pagar Keliling Kantor				
117	Badan Keamanan Laut	Permohonan Hibah Dukungan Operasional	Batam	300.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
118	Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I	Permohonan Dukungan Kendaraan Sepeda Motor Roda Tiga	Tanjungpinang	300.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					Konflik di Daerah	
119	Komite Intelijen Daerah	Permohonan Hibah Dukungan Operasional	Batam	300.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
120	Pangkalan Udara Raja Haji Fisabilillah	Permohonan Hibah Dukungan Operasional	Tanjungpinang	300.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	
121	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	Permohonan Hibah Kendaraan Operasional Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (Fortuner)	Tanjungpinang	300.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	
122	Komando Armada I	Permohonan Hibah Uang dan Barang Motor Patwal	Batam		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
123	Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri	Permohonan Hibah Barang Mobil Fortuner	Tanjungpinang	20.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
124	Polresta Barelang Batam	1 Sped 350jt	Batam	20.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
125	Pangkalan Utama TNI Angkatan	1 Sped 350jt	Batam	20.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
	Laut IV				Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
126	KODIM Batam	2 Sped 700jt	Batam	20.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
127	Polresta Tanjungpinang	Ppermohonan Hibah untuk di tempatkan di ruang Pelayanan SKCK berupa	Tanjungpinang	20.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
		Kanopi, sofa tempat duduk, Dispenser Galon bawah, AC floor standing, Kulkas Mini, Smart TV;			Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

**BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya Menciptakan bentuk sinkronisasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka diharapkan program/kegiatan yang telah direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan implementasi dari program nasional yang bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, adapun kegiatan secara nasional dilaksanakan melalui melalui 6 (enam) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan ;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Sehingga diharapkan pada akhirnya program/kegiatan/sub kegiatan yang berjalan mampu bereperan secara totalitas dan tepat sasaran. Hal ini kemudian menjadi dasar penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang terhimpun dalam Program kerja ;

1. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Sekretariat;
2. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
3. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri;

4. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi ;
5. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

Dari 5 (lima) Program Kerja di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Merumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Mengadakan Pembinaan hubungan dengan Partai Politik, Partai Politik peserta Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Instansi maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik ;
3. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela Negara, dan pembinaan kerukunan umat beragama ;
4. Melaksanakan pembinaan pembauran bangsa serta pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan/ atau LSM asing ;
5. Melakukan pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah dalam menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Memfasilitasi pelaksanaan kemajuan dan peningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Mengadakan suatu perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan

diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, pogram serta kegiatan.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai, yaitu:

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan (*Renstra Kesbangpol 2025-2029*).

Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan 2 (dua) Sasaran Badan Kesbangpol untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Adapun 2 (dua) sasaran Badan Kesbangpol sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan beserta indikator capaiannya adalah sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Beragama yang Rukun, Toleran, Demokratis Berlandaskan Pancasila dan UUD'45 di Provinsi Kepulauan Riau dengan sasaran :
 1. Meningkatnya kapasitas Lembaga Demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau.
 2. terselesaikanya Potensi Konflik di Provinsi Kepulauan Riau.

Prioritas nasional menjadi salah satu dasar bagi Kesbangpol untuk mereposisi Renja Kesbangpol Tahun 2026, sebagaimana telah ditetapkan kepala daerah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kesbangpol dalam Renja Kesbangpol Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026, sebagai berikut : (Tabel 4.1)

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						54.135.815.448,33							41.640.810.468,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						54.135.815.448,33							41.640.810.468,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						54.135.815.448,33							41.640.810.468,00	
1,	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						11.989.857.226,77						-	18.092.752.547,00	
		[Meningkatkan Kualitas Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik]	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.60 89.64	83.88 88.54	83.97 88.55	84.85 88.56	11.989.857.226,77	-	-	-	-	-	-	18.092.752.547,00	-
			Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah													
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	502.382.015,00			-	-	-	-	582.198.487,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22 Dokumen	267.991.663,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		294.790.829,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	123.995.831,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		136.395.415,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	110.394.521,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		151.012.243,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.173.853.344,54			-	-	-	-	12.304.395.454,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/ Bulan	9.592.408.662,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.304.804.947,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	543.742.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		833.477.040,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	26.525.998,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		116.870.344,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	11.176.684,44	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.243.123,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	37.255.615,33			-	-	-	-	149.221.584,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				61 Paket	14.902.246,13	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		59.688.634,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	22.353.369,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		89.532.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	556.603.515,05			-	-	-	-	2.166.511.783,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	141.571.338,26	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		623.746.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	14.902.246,13	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		59.688.634,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.941.347,74	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.797.612,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.353.369,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		92.517.382,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SI	LOKA	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	14.902.246,13	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.657.497,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	316.677.352,26	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.121.960.696,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	7.451.123,07	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.828.748,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	29.804.492,26	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		131.314.994,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	313.987.373,28			-	-	-	-	1.149.006.195,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	135.160.419,69	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		361.116.233,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel															

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	111.766.845,99	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		492.431.226,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	67.060.107,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		295.458.736,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	287.988.346,29			-	-	-	-	1.268.841.878,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	223.533.691,67	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		984.862.453,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.736.772,04	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		69.334.317,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	48.717.882,58	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		214.645.108,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	117.787.017,28			-	-	-	-	472.577.166,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	10.878.639,63	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.798.704,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	62.077.299,92	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		219.937.471,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	7.575.462,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.697.249,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	37.255.615,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		164.143.742,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						3.291.201.000,00						-	3.249.079.448,00	
		[Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Mewujudkan Kerukunan Bangsa]	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani	0.002 100	0 100	0.002 100	0.002 100	3.291.201.000,00	-	-	-	-	-	-	3.249.079.448,00	-
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penanganan Konflik Suku dan Etnis (Dengan Satuan:Kasus) Jumlah Pemuda dan Ormas yang sesuai ketentuan yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara	-			1 Kasus 6270 Orang	3.291.201.000,00			-	-	-	-	3.249.079.448,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72.614.990,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				6066 Orang	1.394.326.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		272.614.990,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.116.233,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		71.626.360,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		129.844.317,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka														

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.750.907,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		119.377.267,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	71.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		119.377.267,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		138.797.612,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				35 Orang	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.015.959.505,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						14.070.933.852,62						-	6.314.166.997,00	
		[Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Melalui Pendidikan Politik]	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat	61.11	11.11	33.33	38.89	14.070.933.852,62	-	-	-	-	-	-	6.314.166.997,00	-

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SI	LOKA	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah partai politik yang mendapatkan kursi dan lembaga pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan pendidikan politik	-			12 Partai dan Lembaga	14.070.933.852,62			-	-	-	-	6.314.166.997,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				6114 Orang	4.276.083.947,31	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		521.373.403,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	9.744.849.905,31	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.531.677.361,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.116.233,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SI	LOKA	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4,	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						3.944.274.173,26							88 %	1.971.554.093,00	
		[Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan]	Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	85.71	97	85	85	3.944.274.173,26	-	-	-	-	-	-	1.971.554.093,00	-	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	3.944.274.173,26			-	-	-	-	1.971.554.093,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				150 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		338.544.160,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				40 Orang	3.844.274.173,26	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.371.893.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.116.233,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5,	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						3.604.232.000,00						-	1.305.073.716,00		

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat]	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani	100	100	100	100	3.604.232.000,00	-	-	-	-	-	-	1.305.073.716,00	-
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	3.604.232.000,00			-	-	-	-	1.305.073.716,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1200 Orang	299.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		308.593.518,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Orang	3.255.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		735.363.965,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.116.233,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6,	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						17.235.317.195,68						-	10.708.183.667,00	
		[Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial]	Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani	100	100	100	100	17.235.317.195,68	-	-	-	-	-	-	10.708.183.667,00	-

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	17.235.317.195,68			-	-	-	-	10.708.183.667,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2 Orang	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		238.136.114,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1190 Orang	6.541.831.835,42	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.103.047.151,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.116.233,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				4 Dokumen	10.223.485.360,26	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.105.884.169,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							54.135.815.448,33						41.640.810.468,00		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Program dan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar mengawal pelaksanaan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh tanggungjawab menyelenggarakan dan melaksanakan Renja Tahun 2026 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan Renja 2026 dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas program/kegiatan/sub kegiatan adalah :

1. Seluruh unsur Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan kegiatan dan sub kegiatan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Badan dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Dengan disusunnya Ranwal Renja Kesbangpol Tahun 2026, maka penetapan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum, Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat memberikan dukungan dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029 Provinsi Kepulauan Riau.

Ranwal Renja Kesbangpol Tahun 2026 ini, diharapkan juga telah sesuai dengan ketentuan prioritas pembangunan Daerah yang akan menjadi acuan penyusunan Ranwal RKPD 2026 Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dijabarkan dalam Dokumen RKPD 2024 dapat mendukung arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD 2025-2029 Provinsi Kepulauan Riau sasaran dan prioritas dalam RKPD Tahun 2026 akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota, perangkat daerah Provinsi/Kab/Kota dan Instansi Vertikal Terkait. Semoga dengan tersusunnya Ranwal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026, mendorong peningkatan kualitas kinerja dan perannya sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Umum yang menangani urusan bidang kesatuan bangsa dan politik. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2026 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol 2025-2029.

Tanjungpinang, Oktober 2025

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA(IV/D)
NIP.19690510199401 1 004